

ABSTRAK

Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaannya. Ketentuan tersebut membawa akibat hukum bahwa perseroan terbatas (yang selanjutnya dalam tulisan ini disebut dengan Perseroan) memiliki hak, kewajiban, dan harta kekayaan tersendiri, yang terpisah dari hak, kewajiban, dan harta kekayaan para pendiri atau pemegang sahamnya.

Perseroan Terbatas sebagai salah satu badan usaha dalam kegiatan perekonomian membutuhkan pengaturan yang jelas dan mampu untuk dapat mengikuti perkembangan jaman yang kemajuannya sangat pesat ini, khususnya dalam kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi baik dalam lingkup nasional maupun di dalam lingkup internasional.

Berdasarkan hal tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut guna penyusunan Disertasi dengan mengambil judul: **“REKONSTRUKSI PEMBUBARAN PERSEROAN TERBATAS MELALUI PENETAPAN PENGADILAN NEGERI BERBASIS NILAI KEADILAN”**

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan secara yuridis / normatif dapat disimpulkan bahwa Rekonstruksi pembubaran perseroan terbatas melalui penetapan pengadilan negeri berbasis nilai keadilan adalah sebagaimana diketahui, didalam hukum acara dikenal dua proses beracara yaitu *“Contentious Procesrecht”* atau hukum acara sengketa dan *“Non-Contentious Procesrecht”* atau hukum acara non-sengketa. Terhadap *“Contentious Procesrecht”* lazim digunakan surat gugatan untuk menyelesaikan sengketa para pihak melalui *“Putusan Hakim”*. Sebaliknya terhadap *“Non-Contentious Procesrecht”* lazim digunakan surat permohonan untuk meminta *“Penetapan Hakim”*. Berdasarkan *“Contentious Procesrecht”* tersebut, juga berlaku azas *“Audi Et Alteram Partem”* (mendengarkan kedua belah pihak). Azas ini mendalilkan bahwa dalam proses perkara di siding Pengadilan, Majelis Hakim harus para pihak yang bersengketa untuk membela hak dan kepentingan masing – masing. Dengan kata lain, para pihak haruslah diperlakukan sama, adil dan tidak memihak. Sedangkan berdasarkan *“Non-Contentious Procesrecht”* berlaku azas *“Voluntair”* ialah; permohonan untuk memutuskan perkara ke sidang pengadilan tanpa adanya sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*). Jadi menurut penulis apa yang dipermasalahkan pemohon berdasarkan azas hukum *“Non-Contentious Procesrecht”* sama sekali tidak bersentuhan dengan persoalan hak dan kepentingan orang lain.

Kata Kunci : Pembubaran, Perseroan terbatas, dan Pengadilan Negeri

ABSTRACT

Limited Liability Company is a legal entity which is a capital alliance, established under the agreement, engages in business activities with the authorized capital wholly divided into shares and meets the requirements stipulated in the law and its implementing regulations. The provision carries with it the legal consequence that the limited liability company (hereinafter referred to in this paper as the Company) has its own rights, obligations and assets separate from the rights, obligations and assets of its founders or shareholders.

Limited Liability Company as one of the business entities in activities that need and be able to develop their mutual progress very rapidly, especially in the progress of science and technology both nationally and internationally.

Based on that, the writer is interested to do further research in order to prepare the Dissertation with the title: "RECONSTRUCTION OF LIMITATION OF LIMITED COMPANY THROUGH STIPULATION OF DOMESTIC COURTS BASED ON THE VALUE OF JUSTICE"

From the results of research that has been done in juridical / normative can be concluded. Reconstruction of the dissolution of a limited liability company through the establishment of a court of justice based on justice is as it is known that in the law there are two lawyers process called "*Contentious Proceesrecht*" or "*Non-Contentious Proceesrecht*" or law of non-dispute. Against the "*Contentious Proceesrecht*" commonly used a lawsuit to resolve the dispute of the parties through the "Judge Verdict". In contrast to the "*Non-Contentious Proceesrecht*" commonly used application letter to request "Determination of Judges". Based on the "*Contentious Proceesrecht*", also apply the principle of "*Audi Et Alteram Partem*" (listening to both parties). This principle argues that in the proceedings of proceedings in court, the Panel of Judges shall be the parties to the conflict to defend their rights and interests. In other words, the parties should be treated equally, fairly and impartially. While based on "*Non-Contentious Proceesrecht*" apply the principle "Voluntair" is; Request to decide case to court without any dispute with other party (without disputes or differences with another party). So according to the authors what is the question of the applicant on the basis of the legal principle "*Non-Contentious Proceesrecht*" is not in touch with the issue of rights and interests of others.

Keywords: Dissolution, Limited Liability Company, and District Court